PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

MONIKA NATALIA
NIM. B1011221031

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Monika Natalia
NIM	:	B1011221031
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 30 Juli 2026



Monika Natalia
NIM. B1011221031

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Monika Natalia
NIM	:	B1011221031
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang telah dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 30 Juli 2026



Monika Natalia

NIM. B1011221031

LEMBAR YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Monika Natalia
B1011221031

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	25 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP 196205251987031002	9/7/2026	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	9/7/2026	
3.	Anggota Penguji	Farah J. Meutianingrum, S.E., MEc.Dev NIP 199406242024062003	9/7/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 16 JUL 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah "**Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat**".

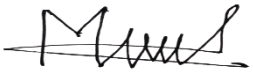
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Farah J. Meutianingrum, S.E., Mec.Dev. selaku dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran tugas akhir ini.
9. Papa tercinta Lo Kim Fung, sosok yang selalu menjadi panutan dalam hidup penulis dan yang penulis rindukan. Terima kasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan selama papa hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar penulis untuk tetap berjuang meraih gelar sarjana yang papa impikan. Walaupun papa tidak dapat mendampingi penulis hingga akhir perjalanan ini, menjalani hidup tanpa kehadiran papa bukanlah hal yang mudah. Namun, setiap nasihat dan didikan yang papa berikan selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini. Semoga papa bangga dengan usaha dan perjuanganku selama meraih gelar sarjana ini. Papa akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati penulis.

10. Mama Tercinta Marni, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan segala pengorbanan yang telah Mama berikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempatku pulang, selalu memberikan semangat di setiap proses, dan tidak pernah berhenti percaya bahwa aku mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang dan semoga kedepannya aku dapat terus membuat Mama bangga serta membalas segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah Mama berikan.
11. Kepada seluruh keluarga besar di kampung**,** terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi berkat dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
12. Kepada para "Makhluk Astral", sahabat-sahabat penulis yaitu Jinjin, Wulan, Aridho, David, Rizka, dan Doflin, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta canda tawa yang telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Jinjin yang telah banyak meluangkan waktu untuk menemani penulis mengerjakan skripsi hingga proses penyusunannya selesai, serta kepada Wulan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan semoga ke depannya kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam meraih cita-cita dan impian masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
13. Kepada Billy Susilo Ledin yang selalu menemani dan selalu menjadi support system dari masa maba hingga saat ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah, serta tetap sabar menemani penulis dalam setiap prosesnya. Kehadiranmu memberikan semangat tersendiri hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ke depannya kita dapat terus saling mendukung, bertumbuh bersama, dan meraih cita-cita yang telah kita impikan. Terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang telah kamu berikan. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkahmu.
14. Teman-teman seperjuangan penulis seluruh mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2022, terkhusus kelas A yang telah membersamai penulis sejak diterima kuliah melalui SNMPTN hingga menjalani proses perkuliahan bersama sampai pada tahap penyelesaian studi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Semoga ke depannya kita semua dapat meraih cita-cita dan kesuksesan di jalan kita masing-masing.
15. Kemudian, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, bantuan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

16. Untuk diriku sendiri, Monika Natalia**,** terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses yang telah dilalui. Terima kasih karena tetap memilih bangkit di tengah berbagai tantangan, belajar dari setiap kegagalan, dan terus melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap usaha, air mata, dan pengorbanan yang telah dilakukan tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya. Tetaplah rendah hati, terus belajar, berani bermimpi, dan jangan pernah berhenti berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku bangga pada diriku sendiri karena telah sampai di titik ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Pontianak, 30 Juli 2026



Monika Natalia

NIM. B1011221031

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 14 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Random Effect menggunakan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan belum mampu meningkatkan kualitas manusia, kesehatan, dan infrastruktur mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan pemerataan pengelolaan anggaran daerah perlu terus ditingkatkan agar pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai secara lebih optimal dan merata antarwilayah.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Belanja Pendidikan; Belanja Kesehatan; Belanja Infrastruktur

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu tujuan utama pembangunan yang dapat didukung melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berdasarkan data kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021–2025, nilai IPM menunjukkan peningkatan setiap tahun, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Kota Pontianak dan Kota Singkawang memiliki nilai IPM yang relatif tinggi, sedangkan beberapa daerah seperti Kayong Utara dan Kapuas Hulu masih memiliki nilai IPM yang lebih rendah.

Belanja pendidikan berperan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan sumber daya manusia, belanja kesehatan bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan belanja infrastruktur berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan kegiatan ekonomi. Namun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut belum tentu memberikan pengaruh yang sama terhadap peningkatan IPM di setiap daerah. Perbedaan kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta kondisi geografis menyebabkan efektivitas belanja pemerintah berbeda antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum meratanya peningkatan IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat meskipun pemerintah daerah terus meningkatkan pengeluaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perbedaan kapasitas fiskal daerah menyebabkan alokasi belanja pemerintah dan kualitas pelayanan publik belum memberikan dampak yang sama terhadap pembangunan manusia. Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk mengetahui sejauh mana belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur memengaruhi IPM di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025.

Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa data panel yang terdiri dari data time series tahun 2021–2025 dan data cross section 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program EViews 12. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap IPM.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model terbaik untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Secara parsial, belanja pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0,465637 dan nilai probabilitas 0,0785. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan IPM. Sementara itu, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 1,492634 dan probabilitas 0,0057. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, belanja infrastruktur juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 1,764082 dan probabilitas 0,0022. Variabel ini menjadi faktor yang memberikan pengaruh terbesar dibandingkan variabel lainnya karena pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000200. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,255995 menunjukkan bahwa sebesar 25,59% variasi IPM dapat dijelaskan oleh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian,

pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor pendidikan agar alokasi belanja tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan belanja kesehatan serta pembangunan infrastruktur secara merata agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin baik dan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR iii
LEMBAR YURIDIS iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK viii
RINGKASAN ix
DAFTAR ISI..... xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
ABSTRACT.....1
1. PENDAHULUAN.....2
2. KAJIAN LITERATUR 7
2.1 Tinjauan Teori 7
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia 8
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah 8
2.2 Tinjauan Empiris.....9
2.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap IPM 9
2.2.2 Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap IPM.....9
2.2.3 Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap IPM 10
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 11
2.3.1 Kerangka Konseptual 11
2.3.2 Hipotesis Penelitian.....11
3. METODE PENELITIAN 12
3.1 Bentuk, Tempat, dan Waktu Penelitian.....12
3.2 Jenis dan Sumber Data.....12
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 12
3.4 Metode dan Alat Analisis 13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.1.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 15
4.1.2 Estimasi Model Regresi Random Effect.....15
4.1.3 Uji Hipotesis 16

4.1.4 Koefisien Determinasi (R^2) 17
4.2 Pembahasan 18
4.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 18
4.2.2 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 19
4.2.3 Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 20
4.2.4 Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 21
5. SIMPULAN DAN SARAN 22
5.1 Simpulan 22
5.2 Rekomendasi 23
DAFTAR RUJUKAN 24
LAMPIRAN 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Indeks) 3
Tabel 1. 2 Belanja Pendidikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah).....4
Tabel 1. 3 Belanja Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah).....5
Tabel 1. 4 Belanja infrastruktur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah).....6
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier……15
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Random Effect 16
Tabel 4. 3 Uji Signifikan t 16
Tabel 4. 4 Uji Signifikan F 17
Tabel 4. 5 Koefisien Determinasi (R^2) 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pengaruh Antar Variabel 11

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Monika Natalia
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of education expenditure, health expenditure, and infrastructure expenditure on the Human Development Index (HDI) of regencies/municipalities in West Kalimantan Province. This research employed a quantitative approach using panel data covering 14 regencies/municipalities during the 2021–2025 period. The data were analyzed using panel data regression with the Random Effect Model (REM) through EViews 12 software. The results indicate that education expenditure has a positive but insignificant effect on the Human Development Index. Meanwhile, health expenditure and infrastructure expenditure have a positive and significant effect on the Human Development Index. These findings suggest that increased local government spending on the education sector has not yet been sufficient to significantly improve human development, whereas increased spending on the health and infrastructure sectors contributes significantly to improving human development through better healthcare services and the provision of basic infrastructure. The findings also indicate that the effectiveness and equitable allocation of regional government expenditure should continue to be improved in order to achieve more optimal and balanced human development across regencies and municipalities in West Kalimantan Province.

Keywords: *Human Development Index; Education Expenditure; Health Expenditure nfrastructure Expenditure;*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 14 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Random Effect menggunakan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan belum mampu meningkatkan kualitas manusia, kesehatan, dan infrastruktur mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan pemerataan pengelolaan anggaran daerah perlu terus ditingkatkan agar pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai secara lebih optimal dan merata antarwilayah.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Belanja Pendidikan; Belanja Kesehatan; Belanja Infrastruktur

[1] b1011221031@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah maupun bangsa, dengan menciptakan lingkungan kehidupan yang panjang, sehat, dan produktif, memastikan individu bisa mewujudkan potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi bagi komunitas dan masyarakat. Pratama dan Mandai (2023) menyatakan Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Secara keseluruhan ini untuk menunjukkan kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Izzah dan Hendarti (2021) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu negara berdasarkan data yang mencerminkan pembangunan manusia secara keseluruhan serta kualitas hidup masyarakat. Keunggulan IPM terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa suatu wilayah dapat mencapai kualitas pembangunan manusia yang tinggi meskipun memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah. Sebaliknya, peningkatan penghasilan saja tidak secara otomatis mengarah pada kemajuan. Violin dan Lutfi (2022) menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi agar pembangunan manusia dapat tercapai secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesejahteraan di dalam suatu negara. IPM memiliki 3 komponen-komponen yaitu kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pendidikan yang dinilai melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup yang ditentukan oleh pengeluaran per kapita. komponen-komponen ini memberikan pandangan tentang pembangunan suatu negara yang memiliki kualitas hidup pada masyarakatnya (BPS, 2024). Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu indikator yang penting untuk menilai tingkat kesejahteraan antarwilayah.

BPS melaporkan pada tahun 2024, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional mulai memberikan hasil yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia meningkat menjadi 75,90, menunjukkan peningkatan signifikan senilai 0,88 poin dari tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Indonesia secara nasional. Meskipun demikian, peningkatan IPM yang terjadi masih menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan agar kualitas pembangunan manusia dapat terus ditingkatkan secara lebih optimal.

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data BPS (2025), menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam upaya pembangunan manusia. Pada tahun 2021, IPM Kalimantan Barat tercatat sebesar 68,99 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,09 pada tahun 2025, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Jika ditinjau lebih lanjut, kondisi IPM pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan variasi yang lebih kompleks, di mana setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam meningkatkan IPM. Hal tersebut tercermin pada data pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Indeks)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	69,03	69,88	70,60	71,20	72,08
Bengkayang	68,04	68,74	69,53	70,30	70,99
Landak	66,33	67,28	68,22	69,13	69,92
Mempawah	67,00	67,91	68,91	69,63	70,59
Sanggau	67,18	67,87	68,73	69,40	70,36
Ketapang	68,39	68,86	69,61	70,34	71,30
Sintang	67,66	68,59	69,39	70,13	70,92
Kapuas Hulu	65,98	66,91	67,86	68,77	69,24
Sekadau	65,48	66,13	66,83	67,74	68,73
Melawi	66,06	66,99	67,92	68,81	69,80
Kayong Utara	64,18	65,09	66,06	67,05	67,60
Kubu Raya	69,09	69,83	70,50	71,14	72,01
Kota Pontianak	80,59	81,10	81,63	82,22	82,80
Kota Singkawang	72,90	73,66	74,13	74,68	75,67
Prov Kalimantan Barat	68,99	69,71	70,47	71,19	72,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan variasi yang beragam yang mengalami peningkatan. Beberapa daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi dan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya yaitu Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya. Sebaliknya, daerah yang memiliki IPM terendah seperti Kayong Utara dan Sekadau yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih belum merata, meskipun secara umum seluruh daerah telah menunjukkan tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun.

Kota yang memiliki pusat kegiatan ekonomi cenderung mengalami peningkatan IPM lebih cepat dibanding daerah lain. Kondisi ini diperkuat oleh akses transportasi yang memadai, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau fasilitas dan peluang ekonomi (BPS, 2024). Selain itu, tersedianya fasilitas-fasilitas yang lengkap dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup dan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang terarah dan inklusif, sangat penting agar peningkatan IPM dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah provinsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan daerah yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi serta sumber daya daerah. Konsep teori pengeluaran pemerintah oleh Sukirno (2000) menyatakan bahwa salah satu komponen dalam kebijakan fiskal, yaitu upaya pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dengan menetapkan jumlah penghasilan serta belanja negara setiap tahun. Namun, keberhasilan belanja publik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mutu pelaksanaan dan kualitas layanan publik yang diberikan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4), mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD di luar belanja gaji pendidik, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menurut Ratuludji et al. (2023), belanja pendidikan merupakan salah satu komponen belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di sektor pendidikan. Selanjutnya, Roji dalam Ridwan et al. (2020) menjelaskan bahwa belanja pendidikan berkaitan dengan proses perolehan dana serta pemanfaatan sumber pendapatan yang tersedia untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2024) menyatakan bahwa belanja pendidikan mencakup pengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pendidik, penambahan jumlah guru, pengembangan kompetensi profesional guru, penyediaan dan perbaikan fasilitas belajar, termasuk rehabilitasi ruang kelas, serta pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah.

Tabel 1. 2 Belanja Pendidikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	592,64	564,38	582,52	545,60	569,84
Bengkayang	323,37	313,12	351,98	375,53	402,67
Landak	347,40	337,61	424,46	337,39	359,12
Mempawah	283,99	282,06	319,86	333,19	361,75
Sanggau	440,66	430,64	491,12	548,20	584,93
Ketapang	629,99	614,75	667,41	733,59	781,46
Sintang	495,60	477,00	558,13	636,01	684,77
Kapuas Hulu	399,90	387,41	471,27	477,15	505,68
Sekadau	240,32	224,44	249,34	283,44	309,87
Melawi	301,43	284,60	314,54	331,76	357,92
Kayong Utara	202,92	138,64	167,79	195,70	218,36
Kubu Raya	495,96	480,75	514,29	539,21	566,88
Kota Pontianak	427,51	471,71	401,46	467,97	498,73
Kota Singkawang	251,11	208,28	260,22	252,51	276,94
Prov Kalimantan Barat	1.514,82	1.555,32	1.671,95	1.874,46	1.998,25

Sumber: DJPb, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, belanja pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tingkat kabupaten/kota, sebagian besar daerah mengalami penurunan belanja pendidikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Kota Pontianak yang justru mengalami peningkatan. Sementara itu, Kota Singkawang menunjukkan perkembangan belanja pendidikan yang berfluktuasi selama periode 2021–2025, sehingga mencerminkan adanya perubahan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola pengalokasian belanja pendidikan di setiap kabupaten/kota berbeda-beda,

bergantung pada kebutuhan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Belanja kesehatan merupakan komponen pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Mahendra (2020), kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang berperan penting dalam menentukan kualitas hidup, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Selanjutnya, Harsono et al. (2024) menjelaskan bahwa alokasi belanja kesehatan memungkinkan suatu negara untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Muliza et al. (2017) menyatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan obat-obatan dan peralatan medis, serta pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Tabel 1. 3 Belanja Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	370,47	314,78	363,69	246,81	300,74
Bengkayang	213,06	230,20	291,51	310,72	333,58
Landak	219,68	276,01	255,41	372,44	358,12
Mempawah	234,00	250,35	252,17	307,60	329,84
Sanggau	298,63	266,35	328,57	261,04	286,93
Ketapang	424,67	359,82	367,03	439,03	568,21
Sintang	387,38	331,97	320,30	258,21	247,96
Kapuas Hulu	324,76	211,64	239,18	247,68	263,47
Sekadau	143,89	172,12	147,63	299,01	391,56
Melawi	156,19	121,79	149,52	388,68	414,82
Kayong Utara	175,99	78,76	151,00	158,66	169,23
Kubu Raya	200,16	194,68	216,40	145,04	254,78
Kota Pontianak	347,77	337,85	363,37	166,17	176,85
Kota Singkawang	242,41	237,64	305,59	250,13	327,44
Prov Kalimantan Barat	675,41	787,33	857,36	797,32	835,62

Tabel 1.3, belanja kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025 cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat menurun pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Pada tingkat kabupaten/kota, Bengkayang dan Mempawah menunjukkan tren belanja kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya selama periode penelitian. Sebaliknya, Sintang mengalami penurunan belanja kesehatan dari tahun 2021-2025, yang menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran pada sektor kesehatan. Perbedaan tren belanja kesehatan tersebut menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki perkembangan anggaran kesehatan yang berbeda setiap tahunnya.

kemudahan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi mendukung mobilitas, proses pembelajaran, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Alberthus et al., 2025). Menurut Ala,

pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas. Infrastruktur juga berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan tingkat IPM di suatu daerah. Selain itu, infrastruktur yang berkembang juga memperkuat konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan lebih efisien. Kondisi ini pada akhirnya memberikan dampak lanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk.

Laporan DJPb (2024), belanja infrastruktur merupakan alokasi anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendukung pembangunan, peningkatan kualitas, rehabilitasi, serta pemeliharaan berbagai infrastruktur publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi, sarana transportasi, kawasan permukiman, infrastruktur energi dan telekomunikasi, serta berbagai gedung dan fasilitas pelayanan publik. Penyediaan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan dasar. Dengan demikian, belanja infrastruktur diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 4 Belanja infrastruktur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	234,17	263,48	242,24	224,57	218,36
Bengkayang	120,54	304,59	196,73	128,57	195,92
Landak	176,77	187,82	140,45	176,99	204,63
Mempawah	120,90	126,02	133,76	264,40	249,18
Sanggau	200,41	299,19	323,04	292,64	305,77
Ketapang	335,64	391,62	432,99	998,88	912,45
Sintang	166,44	154,97	210,62	209,66	218,93
Kapuas Hulu	245,75	254,32	237,14	274,92	289,37
Sekadau	118,15	156,63	156,06	148,18	152,44
Melawi	164,92	151,06	163,82	137,29	152,67
Kayong Utara	97,37	120,96	156,77	106,08	142,54
Kubu Raya	364,78	357,16	206,08	350,78	368,21
Kota Pontianak	378,29	394,02	427,00	498,10	623,64
Kota Singkawang	283,14	112,82	142,54	124,16	130,87
Prov Kalimantan Barat	996,92	1.057,54	1.451,46	1.094,47	1.180,36

Sumber: DJPb, 2026

Berdasarkan Tabel 1.4, belanja infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi, yaitu meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, menurun pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat pada tahun 2025.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Pontianak merupakan daerah yang menunjukkan peningkatan belanja infrastruktur secara konsisten setiap tahunnya selama periode penelitian. Selain itu, perkembangan belanja infrastruktur pada kabupaten/kota lainnya menunjukkan pola yang bervariasi, di mana beberapa daerah mengalami peningkatan, sementara daerah lainnya mengalami penurunan maupun fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian belanja infrastruktur di setiap kabupaten/kota belum menunjukkan pola yang seragam selama periode 2021–2025.

Alokasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan IPM secara optimal. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum memberikan hasil yang sama di setiap daerah. Beberapa daerah seperti Kota Pontianak dan Kubu Raya sudah mencapai IPM tinggi, sedangkan wilayah lain seperti Kapuas Hulu dan Kayong Utara masih menghadapi keterbatasan dalam belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap peningkatan IPM belum merata. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.